

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya Review Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, 31 Desember 2019
KEPALA DINAS KB DAN PP
KABUPATEN PASURUAN



drg. Loembini Pedjati Lajoeng
Pembina Utama Muda
NIP. 19630626 199102 2 001

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Tugas dan Fungsi	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II RENCANA STRATEGIS	8
2.1. Rencana Strategis Tahun 2018-2023.....	8
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis 2018-2023.....	12
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2020	16
3.1. Rencana Kinerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2020	16
3.2. Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2020	20
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN-LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1	Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati Pasuruan dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Periode Tahun 2019 s/d 2023	10
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Periode Tahun 2019 s/d 2023	11
Tabel 2.3	Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan	15
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020.....	17
Tabel 3.2	Program dan Indikator Program Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023.....	19

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan..... 6



DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019-2023 Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan	28
Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahunan 2020 Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan	32
Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahunan Triwulan 2020 Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2020, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai di lingkungan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan kegiatannya.

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelegaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2014 termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2020 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 bagi Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan kepada Bupati Kabupaten Pasuruan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
12. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Banguna Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dimana Dinas Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh Kepala Dinas yang penyelenggaraannya dituangkan sesuai tugas, fungsi dan struktur organisasi.

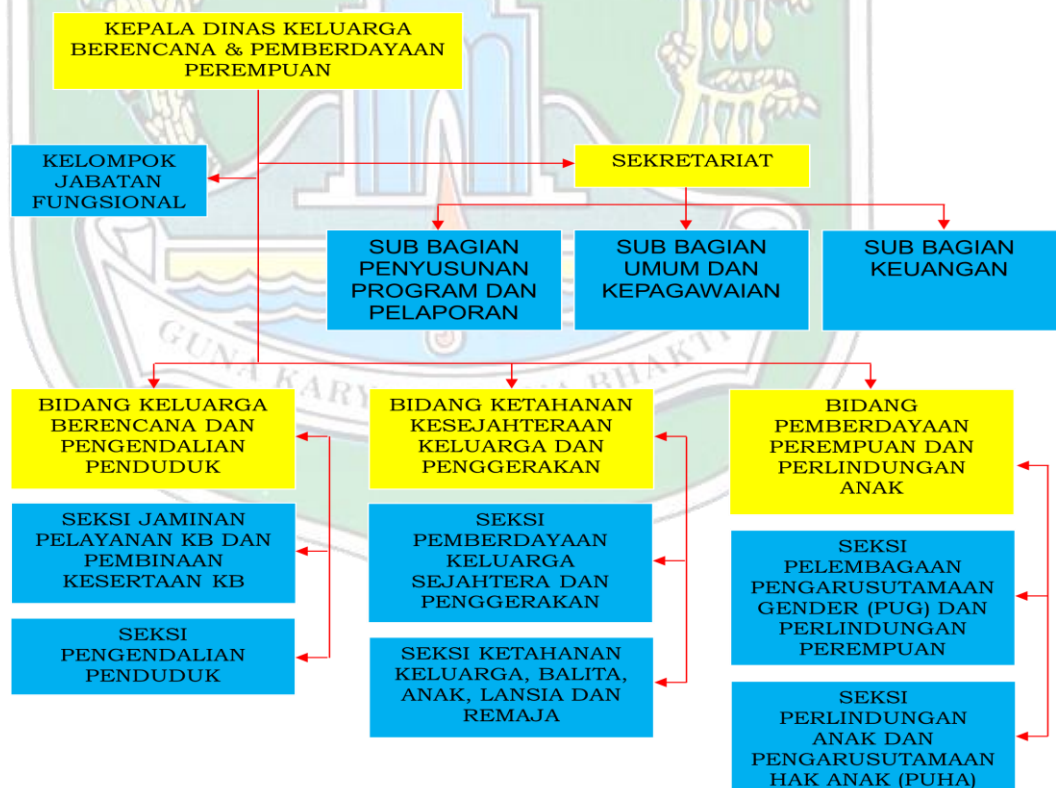
1. Tugas dan Fungsi

Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perempuan dan perlindungan anak
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perempuan dan perlindungan anak
- c) Pelaksanaan evaluasi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perempuan dan perlindungan anak
- d) Pelaksanaan administrasi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perempuan dan perlindungan anak
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Berikut ini struktur organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2019, serta penjelasan mengenai sistematika penulisan.

2. BAB II RENCANA STRATEGIS

Bab ini berisi tentang rencana strategis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 berupa visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan umum.

3. BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Bab ini berisi tentang rencana kinerja yang dilakukan selama 1 tahun yakni tahun 2020 oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian serta kaidah pelaksanaan dan kesimpulan mengenai rencana kinerja tahunan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2020.

5. LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Merujuk pada Misi ke 5 yaitu **Meningkatkan Pelayanan Dasar terutama Pelayanan Kesehatan, Pemukiman dan Pendidikan dengan Mengintegrasikan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagai wujud afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan**, maka tujuan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan ditentukan sebagai berikut :

1. Tujuan

Berdasarkan misi nomor 5 Pemerintah Kabupaten Pasuruan maka tujuan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan 2018-2023 yang merujuk pada sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan nomor 5.1.1 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kesenjangan Masyarakat dengan indikator IPG

2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan perlu adanya sasaran, pada Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Meningkatkan Keluarga Sejahtera yang Berkualitas
- c. Meningkatkan Kesertaan ber-KB.

Dalam menentukan sasaran perlu adanya indikator sasaran antara lain:

Sasaran pertama (Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) mempunyai indikator sasaran sebagai berikut :

1. Presentase anggaran yang responsive gender
2. Presentase kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sasaran kedua (Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas) mempunyai indikator sasaran sebagai berikut :

1. Presentase Tahapan Keluarga Pra S dan KS I

Sasaran ketiga (Meningkatnya Kesertaan ber-KB) mempunyai indikator sasaran sebagai berikut :

1. Presentase sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif

Adapun keselarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dari RPJMD dengan tujuan dan sasaran Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan seperti pada tabel dibawah ini :

RENCANA KINERJA

Keselaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pasuruan dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Periode Tahun 2019 s/d 2023

BUPATI PASURUAN						DINAS KB DAN PP KABUPATEN PASURUAN				
VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	BIDANG / URUSAN
MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA, MASLAHAT, DAN BERDAYA SAING	5. Meningkatkan Pelayanan Dasar terutama Pelayanan Kesehatan, Pemukiman dan Pendidikan dengan Mengintegrasikan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagai wujud afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan	5.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	5.1.1 Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat	I P G (Indeks Pembangunan Gender)	1. Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat	I P G (Indeks Pembangunan Gender)	1. Meningkatnya Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	Prosentase anggaran yang responsif gender	1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Prosentase Kekerasan Perempuan dan Anak	
								2. Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas	Prosentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I	2. Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan
								3. Meningkatnya Kesertaan ber-KB	Prosentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif	3. Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Tujuan dan Sasaran Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan beserta indikator kinerjanya Tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Tahun 2019-2023

Tujuan (1)		Sasaran (2)		Indikator Kinerja (3)		Satuan (4)	Target Kinerja (5)				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat dengan indikator IPG	1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.	Presentase anggaran yang responsive gender	Persen (%)	19,98	21,48	22,98	24,48	25,98
				2.	Presentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Persen (%)	0,0065	0,0060	0,0055	0,0050	0,0045
		2.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas	1.	Presentase Tahapan Keluarga Pra S dan KS I	Persen (%)	40,25	40,00	39,75	39,50	39,25
		3.	Meningkatnya Kesertaan ber-KB	1.	Presentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif	Persen (%)	73,00	73,20	73,40	73,60	73,80

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis 2018-2023

1. Strategi

Strategi diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran

Tujuan :

- a) Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat

Sasaran :

- a) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Strategi yang dilakukan adalah :

- Meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak anak
- Meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga/ organisasi sosial masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
- Meningkatkan koordinasi dan advokasi kepada Bupati dan lintas OPD dalam penganggaran yang responsif gender
- Mengoptimalkan tim pendamping kekerasan tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan Anak untuk pencegahan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta rehabilitasi korban
- Meningkatkan peran serta masyarakat, OPD terkait, dan segenap stake holder dalam mewujudkan Pasuruan Layak Anak dan Pasuruan yang responsive gender

b) Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas

Strategi yang dilakukan adalah :

- Meningkatkan peran serta Tokoh Masyarakat dan Agama, organisasi kemasyarakatan/PKK untuk dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- Mengoptimalkan keberadaan Kampung KB dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
- Meningkatkan pembinaan Tri Bina (BKB, BKR, BKL) dalam ketahanan dan pembangunan keluarga
- Meningkatkan pembinaan remaja melalui Generasi Berencana (GenRe)

c) Meningkatnya Kesertaan ber-KB

Strategi yang dilakukan adalah :

- Meningkatkan dan melakukan revitalisasi Program KB khususnya MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang)
- Pembinaan peserta KB dan peningkatan advokasi – KIE difokus pada sasaran kelompok khusus (pasangan usia muda dan memiliki 2 anak) ; PUS dari keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Miskin), serta pelayanan KB di wilayah sulit dan kumuh melalui kampanye 2 anak cukup dan 4 terlalu.
- Meningkatkan advokasi, promosi, edukasi dan penggerakan masyarakat dan meningkatkan peran serta mitra kerja dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk ber KB
- Meningkatkan pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan jumlah akseptor, dan menurunkan angka

Drop Out (DO), serta meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP)

- Mengoptimalkan distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB/Puskesmas secara optimal agar kebutuhan ber KB terpenuhi secara baik.

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan bentuk konkrit upaya pelaksanaan Rencana Strategis sebagai panduan bagi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan agar lebih optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu arah kebijakan juga digunakan sebagai pedoman dalam mendukung ketercapaian indikator sasaran kepala daerah 5 tahun kedepan. Adapun keselarasan antara arah kebijakan Pemerintah Daerah dengan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

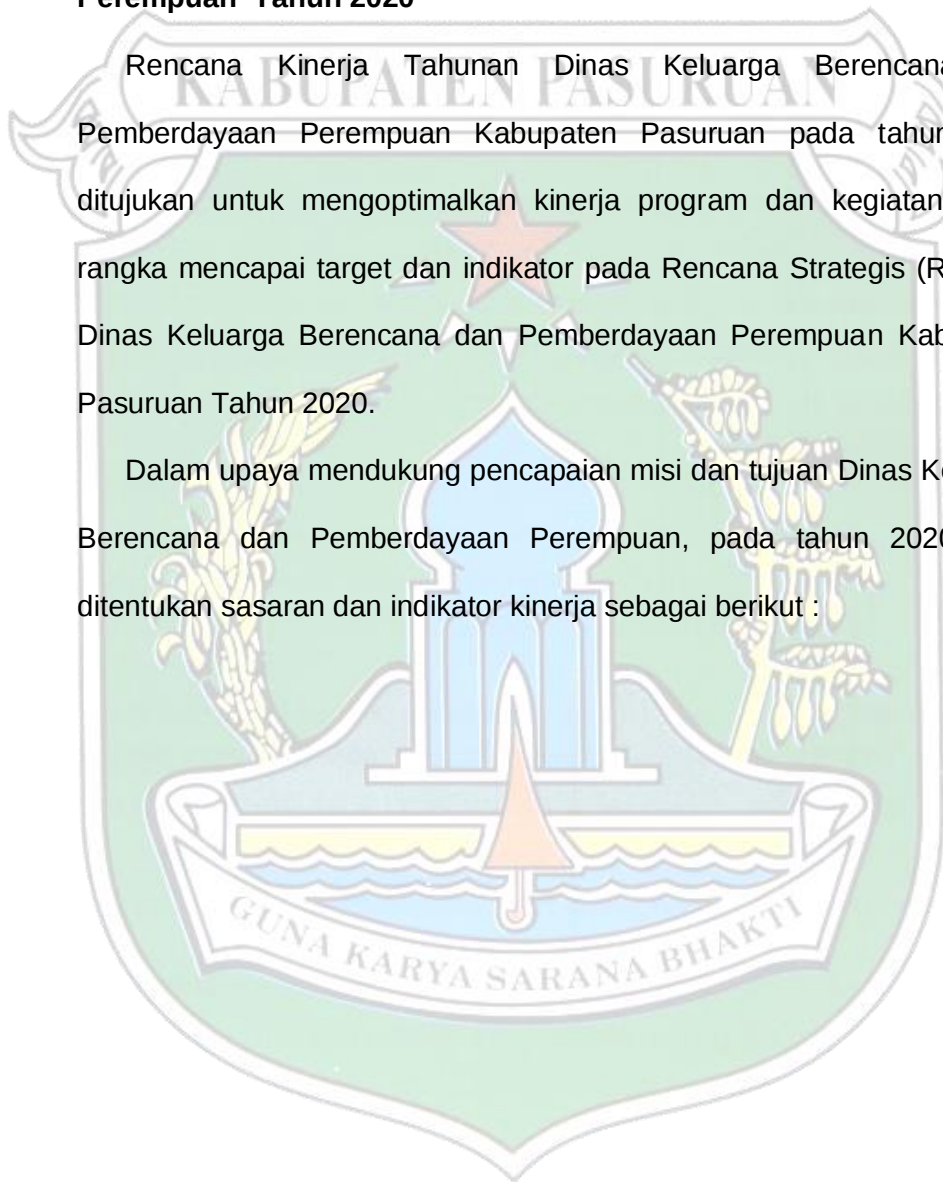
Tabel 2.3.
**Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Dinas Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan**

Instansi	2019	2020	2021	2022	2023
Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Pembangunan Berbasis Keluarga dan Pendidikan Karakter	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Konektivitas Infrastruktur	Kelembagaan Ekonomi Desa	Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	1. Peningkatan sasaran akseptor MKJP 2. Pembangunan ketahanan keluarga dan Pembentukan Karakter Keluarga yang Religius 3. Optimalisasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 4. Peningkatan anggaran yang responsive gender 5. Peningkatan gender <i>equality</i> (kesetaraan gender di semua bidang)	1. Pelayanan akseptor KB yang berkualitas 2. Optimalisasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Pembentukan Karakter Keluarga yang Religius 4. Peningkatan Anggaran Yang responsive Gender	1. Pemerataan kelengkapan dukungan pelayanan dan penyuluhan KB di Kampung KB 2. Dukungan sarana prasarana bagi komunitas Genre dan forum anak 3. Optimalisasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 4. Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Pembentukan Karakter Keluarga yang Religius 5. Peningkatan Anggaran Yang responsive Gender	1. Optimalisasi Kampung KB dan komunitas GenRe 2. Optimalisasi tim pendamping kekerasan tingkat desa/kelurahan dan forum anak 3. Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Pembentukan Karakter Keluarga yang Religius 4. Peningkatan Anggaran Yang responsive Gender	1. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi akseptor KB keluarga Pra S dan KS 1 2. Penguatan korban kekerasan secara fisik, psikologis dan ekonomi 3. Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Pembentukan Karakter Keluarga yang Religius 4. Peningkatan Anggaran Yang responsive Gender

BAB III**RENCANA KINERJA TAHUN 2019****3.1. Rencana Kinerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2020**

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020.

Dalam upaya mendukung pencapaian misi dan tujuan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, pada tahun 2020 telah ditentukan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :



Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target
Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

Tujuan		Sasaran		Indikator		Target (%)
1.	Meningkatnya Kesenjangan Masyarakat	1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.	Prosentasi Anggaran yang Responsif Gender	21,48
				2.	Presentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	0,0060
		2.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas	1.	Presentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I	40,00
		3.	Meningkatnya Kesertaan ber-KB	1.	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	73,20

Sementara dengan keterkaitan antara sasaran, program dan indikator program jangka menengah Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 terdapat perubahan program antara tahun 2019 dan 2020, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 satu bidang memiliki 1 program saja, berikut ini tabel program dan kegiatan di tahun 2019 dan 2020-2023:

Tabel 3.2
Program dan Indikator Program
Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

No. (1)	Program (2)	Indikator Program (3)	Target Kinerja Program Tahun Ke-				
			2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)	2023 (8)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	-	-	-	-
4	Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	-	-	-	-
5	Keluarga Berencana	Prosentase Akseptor KB Baru	100%	-	-	-	-
6	Pelayanan Kontrasepsi	Prosentase Pelayanan Kontrasepsi	100%	-	-	-	-
7	Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Prosentase Meningkatnya Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100%	-	-	-	-
8	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB	Meningkatnya Dukungan Sarana Prasarana Penyuluhan KB	100%	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri	Prosentase Meningkatnya Pembinaan KB/KR Mandiri	100%	-	-	-	-
10	Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Konseling KRR	Prosentase Meningkatnya Layanan Informasi dan Konseling KRR	100%	-	-	-	-
11	Keluarga Sejahtera	Prosentase Meningkatnya Kesejahteraan Kader	100%	-	-	-	-
12	Pengembangan Model Tribina (BKB,BKR,BKL)	Prosentase Meningkatnya Pengembangan Model Tribina (BKB,BKR,BKL)	100%	-	-	-	-
13	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Prosentase Meningkatnya Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100%	-	-	-	-
14	Pembinaan Lingkungan Sosial	Prosentase Meningkatnya Lingkungan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%
15	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Prosentase Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100%	-	-	-	-
16.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Prosentase Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100%	-	-	-	-
17.	Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Prosentase Meningkatnya Peran Serta Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	100%	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Prosentase anggaran responsive gender 2. Prosentase Kekerasan perempuan yang terselesaikan 3. Prosentase kekerasan anak yang terselesaikan	-	1. 25% 2. 100% 3. 100%	1. 50% 2. 100% 3. 100%	1. 75% 2. 100% 3. 100%	1. 100% 2. 100% 3. 100%
19.	Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	Peningkatan jumlah akseptor	-	7050 akseptor	7755 akseptor	8531 akseptor	9384 akseptor
20.	Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan	1. Penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dan KS 1 2. Peningkatan Jumlah Desa Yang memiliki kelompok Tribina	-	1. 1000 KK 2. 10 Kelompok	1. 1100 KK 2. 20 Kelompok	1. 1210 KK 2. 30 Kelompok	1. 1331 KK 2. 40 Kelompok

3.2. Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2020

Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mengusung 6 program dan 35 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.13.344.703.480,- seperti yang tertera dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2020. Berikut ini Program dan Kegiatan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2020 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f. Penyediaan Makanan dan Minuman
- g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- h. Penyediaan Jasa Perkantoran
- i. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a. Pembangunan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Mebelair
- d. Pengadaan Peralatan Kantor
- e. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
- f. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- g. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor

3. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kegiatan :

- a. Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
- b. Pelatihan Peningkatan Keterampilan bagi Organisasi Perempuan dan Masyarakat
- c. Evaluasi PUG
- d. Fasilitasi Perlindungan Perempuan
- e. Fasilitasi Perlindungan Anak
- f. Fasilitasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak

4. Program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Kegiatan :

- a. KIE dan Pelayanan KB
- b. Biaya Operasional KB
- c. Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
- d. Peningkatan Dukungan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB
- e. Pencatatan Pelaporan dan Pendataan Keluarga
- f. Pembinaan Koalisi Kependudukan
- g. Sosialisasi Dimensi Kependudukan

5. Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan

Kegiatan :

- a. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- b. KIE Berbagai Media dan Mupen
- c. Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Konseling KRR
- d. Pembinaan Tribina (BKB,BKR, BKL) dan UPPKS
- e. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Kegiatan :

- a. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 ini merupakan komitmen Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas *output* yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan

tersusunya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2020.





RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019

Lampiran 1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019-2023

Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun (%)					Kebijakan	Program	Indikator Program	Target Tahun					Keterangan
				2019	2020	2021	2022	2023				2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	
Meningkatkan Pelayanan Dasar terutama Pelayanan Kesehatan, Pemukiman dan Pendidikan dengan Mengintegrasikan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagai wujud afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan	1. Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat dengan indikator IPG	1. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Presentase anggaran yang responsive gender	19,98	21,48	22,98	24,48	25,98	Peningkatan anggaran yang responsive gender dan Peningkatan gender equality (kesetaraan gender di semua bidang) dan Optimalisasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Prosentase anggaran responsive gender 2. Prosentase Kekerasan perempuan yang terselesaikan 3. Prosentase kekerasan anak yang terselesaikan	100	1. 25 2. 100 3. 100	1. 50 2. 100 3. 100	1. 75 2. 100 3. 100	1. 100 2. 100 3. 100	
			2. Presentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	0,0065	0,0060	0,0055	0,0050	0,0045									
		2. Meningkatkan Kesertaan ber-KB	1. Prosentase sasaran pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	73,00	73,20	73,40	73,60	73,80	Peningkatan cakupan akseptor MKJP	Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	Peningkatan jumlah akseptor	100,00%	7050 akseptor	7755 akseptor	8531 akseptor	9384 akseptor	

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN 2020**

		3. Meningkatkan Keluarga Sejahtera yang Berkualitas	1. Presentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I	40,25	40,00	39,75	39,50	39,25	Pembangunan dan ketahanan keluarga	Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan	1. Penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dan KS 1 2. Peningkatan Jumlah Desa Yang memiliki kelompok Tribina	100,0 0%	1. 1000 KK 2. 10 Kelompok	1. 1100 KK 2. 20 Kelompok	1. 1210 KK 2. 30 Kelompok	1. 1331 KK 2. 40 Kelompok	
										Pembinaan Lingkungan Sosial	Prosentase Meningkatnya Pembinaan Lingkungan Sosial	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN 2020**

Lampiran 2

Rencana Kinerja Tahunan 2020

Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan			Keterangan
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	
Gaji Pegawai	Gaji dan Tunjangan	Persen (%)	100	Belanja Pegawai	Terpenuhinya Gaji Tunjangan dan Pegawai	Prosentase terpenuhinya gaji dan tunjangan	100%	Gaji Pegawai	Input : 1. Dana DAU Output : 1. Jumlah Gaji Outcome : 1. Prosentase gaji tunjangan		
Penunjang				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pemenuhan pelayanan perkantoran	Prosentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : 1. Dana DAU Output : 1. Jumlah Pembayaran Listrik/air/telepon/internet Outcome : 1. Prosentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Input : Rp. 50.000.000,- Output : 12 bulan Outcome : 100 %	
								Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : 1. Dana DAU Output : 1. Jumlah Pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola aset, pelaku pengadaan barang/jasa Outcome : 1. Prosentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Input : Rp. 22.805.000,- Output : 12 bulan Outcome : 100 %	

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN 2020**

							Penyediaan Alat Tulis Kantor	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1.tersedianya pembelian alat tulis kantor <u>Outcome :</u> 1.Prosentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Input : Rp. 30.000.000,- Output : 12 bulan Outcome : 12 bulan	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. jumlah barang cetak dan penggandaan <u>Outcome :</u> 1.Prosentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Input : Rp. 9.050.000,- Output : 12 bulan Outcome : 100 %	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor <u>Outcome :</u> 1.Prosentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Input : Rp.10.000.000,- Output : 12 bulan Outcome : 100 %	
							Penyediaan Makanan dan Minuman	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. jumlah kegiatan rapat dan tamu <u>Outcome :</u> 1.Prosentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Input : Rp. 50.000.000,- Output : 12 bulan Outcome : 100 %	

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN 2020**

								Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. jumlah laporan koordinasi dan konsultasi <u>Outcome :</u> 1. Prosentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Input : Rp. 96.477.000,- Output : 12 bulan Outcome : 100 %	
								Penyediaan Jasa Perkantoran	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan thl <u>Outcome :</u> 1. Prosentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Input : Rp. 798.756.200,- Output : 12 bulan Outcome : 100 %	
								Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. jumlah penilaian angka kredit 2. jumlah kegiatan forum opd <u>Outcome :</u> 1. Prosentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Penunjang				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pembangunan Gedung Kantor	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. jumlah pembangunan gedung <u>Outcome :</u> 1. Prosentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Input : Rp. 10.000.000,- Output : 12 bulan Outcome : 100 %	

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN 2020**

							Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Input : 1. Dana DAU Output : 1. jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Outcome : 1. Prosentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Input : Rp. 2.500.000,- Output : 3 paket Outcome : 100 %	
							Pengadaan Mebelair Input : 1. Dana DAU Output : 1. jumlah pengadaan mebelair Outcome : 1. Prosentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Input : Rp. 2.500.000,- Output : 1 paket Outcome : 100 %	
							Pengadaan Peralatan Kantor Input : 1. Dana DAU Output : 1. jumlah pengadaan peralatan kantor Outcome : 1. Prosentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Input : Rp. 30.000.000,- Output : 4 paket Outcome : 100 %	
							Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor Input : 1. Dana DAU Output : 1. jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung Outcome : 1. Prosentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Input : Rp.30.000.000,- Output : 1 paket Outcome : 100 %	

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN 2020**

								Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional <u>Outcome :</u> 1. Prosentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Input : Rp.195.000.000,- Output : 12 bulan Outcome : 100 %	
								Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor <u>Outcome :</u> 1. Prosentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Input : Rp.10.000.000,- Output : 12 bulan Outcome : 100 %	
1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Prosentase Anggaran yang Responsive Gender	Persen (%)	21,48	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Prosentase anggaran responsive gender 2. Prosentase Kekerasan perempuan yang terselesaikan 3. Prosentase kekerasan anak yang terselesaikan	1. 25 % 2. 100 % 3. 100%	Pelaksanaan KIE tentang keadilan dan kesetaraan gender (KKG)	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. Jumlah kegiatan KIE KKG <u>Outcome :</u> 1. Prosentase anggaran responsive gender 2. Prosentase Kekerasan perempuan yang terselesaikan 3. Prosentase kekerasan anak yang terselesaikan	Input : Rp. 614.072.000,- Output : 55 Kegiatan Outcome : 1. 25% 2. 100% 3. 100%	

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN 2020**

2. Presentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Persen (%)	0,0060					Pelatihan peningkatan ketrampilan bagi organisasi perempuan dan masyarakat	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. Jumlah organisasi perempuan dan masyarakat yang mendapat pelatihan <u>Outcome :</u> 1. Prosentase anggaran responsive gender 2. Prosentase Kekerasan perempuan yang terselesaikan 3. Prosentase kekerasan anak yang terselesaikan	<u>Input :</u> Rp25.583.000- <u>Output :</u> 20 klompok <u>Outcome :</u> 1. 25% 2. 100% 3. 100%	
							Evaluasi PUG	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. Jumlah kegiatan evaluasi PUG <u>Outcome :</u> 1. Prosentase anggaran responsive gender 2. Prosentase Kekerasan perempuan yang terselesaikan 3. Prosentase kekerasan anak yang terselesaikan	<u>Input :</u> Rp 183.635.806,- <u>Output :</u> 4 Kegiatan <u>Outcome :</u> 1. 25% 2. 100% 3. 100%	
							Fasilitasi perlindungan perempuan	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. Jumlah perempuan yang terfasilitasi <u>Outcome :</u> 1. Prosentase anggaran responsive gender 2. Prosentase Kekerasan perempuan yang terselesaikan 3. Prosentase kekerasan anak yang terselesaikan	<u>Input :</u> Rp 100.000.000,- <u>Output :</u> 25 orang <u>Outcome :</u> 1. 25% 2. 100% 3. 100%	

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN 2020**

								Fasilitasi perlindungan anak	<u>Input</u> : 1. Dana DAU <u>Output</u> : 1.Jumlah anak yang terfasilitasi <u>Outcome</u> : 1.Jumlah kegiatan KIE KKG <u>Outcome</u> : 1. Prosentase anggaran responsive gender 2. Prosentase Kekerasan perempuan yang terselesaikan 3.Prosentase kekerasan anak yang terselesaikan	<u>Input</u> : 1. Dana DAU <u>Output</u> : 1.Jumlah kegiatan KIE KKG <u>Outcome</u> : 1. Prosentase anggaran responsive gender 2. Prosentase Kekerasan perempuan yang terselesaikan 3.Prosentase kekerasan anak yang terselesaikan	Input : Rp 100.000.000,- Output : 30 orang Outcome : 1. 25% 2. 100% 3. 100%	
								Fasilitasi kabupaten layak anak	<u>Input</u> : 1. Dana DAU <u>Output</u> : 1.Jumlah OPD yang tersosialisasi tentang KLA <u>Outcome</u> : 1. Prosentase anggaran responsive gender 2. Prosentase Kekerasan perempuan yang terselesaikan 3.Prosentase kekerasan anak yang terselesaikan	<u>Input</u> : 1. Dana DAU <u>Output</u> : 1.Jumlah OPD yang tersosialisasi tentang KLA <u>Outcome</u> : 1. Prosentase anggaran responsive gender 2. Prosentase Kekerasan perempuan yang terselesaikan 3.Prosentase kekerasan anak yang terselesaikan	Input : Rp 467.050.000,- Output : 56 OPD Outcome : 1. 25% 2. 100% 3. 100%	
2. Meningkatnya Kesertaan ber-KB	3.Presentase sasaran pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	Persen (%)	73,20	Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	Meningkatnya Akseptor KB Baru	Peningkatan jumlah akseptor	7050 akseptor	KIE dan pelayanan KB	<u>Input</u> : 1. Dana DAU <u>Output</u> : 1.Jumlah kegiatan pelayanan KIE dan pelayanan KB <u>Outcome</u> : 1. Peningkatan jumlah akseptor	<u>Input</u> : 1. Dana DAU <u>Output</u> : 1.Jumlah kegiatan pelayanan KIE dan pelayanan KB <u>Outcome</u> : 1. Peningkatan jumlah akseptor	Input : Rp 382.396.000,- Output : 51 Kegiatan Outcome : 7050 akseptor	

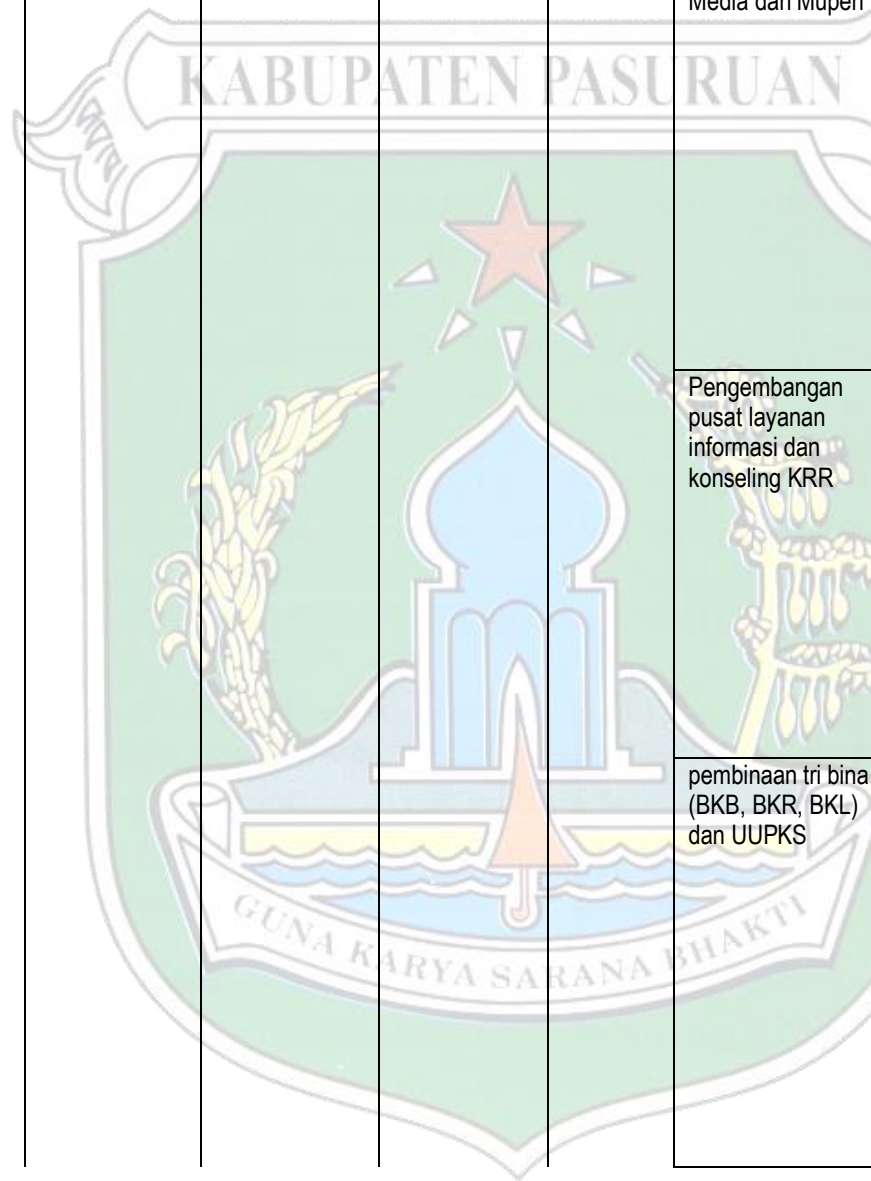
**RENCANA KINERJA
TAHUNAN 2020**

							Biaya operasional KB	<u>Input :</u> 1. Dana DAK <u>Output :</u> 1. Jumlah biaya BOKB <u>Outcome :</u> 1. Peningkatan jumlah akseptor	Input : Rp 7.094.696.000- Output : 12 bulan Outcome : 7050 akseptor	
							Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. Jumlah kegiatan pembinaan kader <u>Outcome :</u> 1. Peningkatan jumlah akseptor	Input : Rp 396.060.000,- Output : 12 bulan Outcome : 7050 akseptor	
							Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan dan penyuluhan KB	<u>Input :</u> 1. Dana DAK <u>Output :</u> 1. Jumlah sarana prasarana penyuluhan dan pelayanan KB <u>Outcome :</u> 1. Peningkatan jumlah akseptor	Input : Rp 970.500.000,- Output : 2 jenis Outcome : 7050 akseptor	
							Pencatatan pelaporan dan pendataan keluarga	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. Jumlah kegiatan pencatatan pelaporan dan PK <u>Outcome :</u> 1. Peningkatan jumlah akseptor	Input : Rp 91.800.000,- Output : 14 Kegiatan Outcome : 7050 akseptor	

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN 2020**

								Pembinaan Koalisi Kependudukan	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. Jumlah kegiatan pencatatan pelaporan dan PK <u>Outcome :</u> 1. Peningkatan jumlah akseptor	Input : Rp 20.000.000,- Output : 1 Kegiatan Outcome : 7050 akseptor	
								Sosialisasi Dimensi Kependudukan	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. Jumlah sosialisasi dimensi kependudukan <u>Outcome :</u> 1. Peningkatan jumlah akseptor	Input : Rp 27.402.474,- Output : 1 Kegiatan Outcome : 7050 akseptor	
3. Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Berkualitas	4. Presentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I	Persen (%)	40,00	Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan	Meningkatnya Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan	1. Penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dan KS 1 2. Peningkatan Jumlah Desa Yang memiliki kelompok Tribina	1. 1000 KK 2. 10 Kelompok	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. Jumlah kegiatan Pusyan Gatra <u>Outcome :</u> 1. Penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dan KS 1 2. Peningkatan Jumlah Desa Yang memiliki kelompok Tribina	Input : Rp 79.085.000,- Output : 22 Kegiatan Outcome : 1. 1000 KK 2. 10 Kelompok	

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN 2020**



KIE Berbagai Media dan Mupen	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. Jumlah kegiatan KIE Berbagai Media dan Mupen <u>Outcome :</u> 1. Penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dan KS 1 2.Peningkatan Jumlah Desa Yang memiliki kelompok Tribina	Input : Rp 161.970.000,- Output : 12 Kegiatan Outcome : 1. 1000 KK 2. 10 Kelompok
Pengembangan pusat layanan informasi dan konseling KRR	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. Jumlah kegiatan PIK/KRR <u>Outcome :</u> 1. Penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dan KS 1 2.Peningkatan Jumlah Desa Yang memiliki kelompok Tribina	Input : Rp213.325.000,- Output : 30 Kegiatan Outcome : 1. 1000 KK 2. 10 Kelompok
pembinaan tri bina (BKB, BKR, BKL) dan UUPKS	<u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. Jumlah pembinaan tribina dan UPPKS <u>Outcome :</u> 1. Penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dan KS 1 2.Peningkatan Jumlah Desa Yang memiliki kelompok Tribina	Input : Rp 105.040.000,- Output : 12 Kegiatan Outcome : 1. 1000 KK 2. 10 Kelompok

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN 2020**

								Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga <u>Input :</u> 1. Dana DAU <u>Output :</u> 1. Jumlah kegiatan Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan <u>Outcome :</u> 1. Penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dan KS 1 2. Peningkatan Jumlah Desa Yang memiliki kelompok Tribina	Input : Rp 405.000.000,- Output : 12 bln Outcome : 1. 1000 KK 2. 10 Kelompok	
				Pembinaan Lingkungan Sosial	Meningkatnya Pembinaan Lingkungan Sosial	Prosentase Meningkatnya Pembinaan Lingkungan Sosial	100%	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat <u>Input :</u> 1. Dana DBHCT <u>Output :</u> 1. Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat <u>Outcome :</u> 1. Prosentase Meningkatnya Pembinaan Lingkungan Sosial	Input : Rp 475.000.000,- Output : 6 Kegiatan Outcome : 100 %	

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN 2020**
Lampiran III

RENCANA KERJA TAHUNAN (R K T)

OPD : DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. PASURUAN
TAHUN : 2020

SASARAN						PROGRAM / KEGIATAN						
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)				Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Anggaran & Kinerja)				
		Triw-I	Triw-II	Triw-III	Triw-IV			Triw-I	Triw-II	Triw-III	Triw-IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						I. BELANJA TIDAK LANGSUNG						
Gaji Pegawai	Gaji dan Tunjangan Pegawai	25 %	50 %	75 %	100 %	1.	BELANJA PEGAWAI	OUTCOME : Prosentase terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	2.091.710.000,- 25,00 %	1.120.030.000,- 50,00 %	670.272.000,- 75,00 %	4.381.167.000,- 100,00 %
						- Gaji Pegawai	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah gaji	2.091.710.000,- 3 bln	1.120.030.000,- 6 bln	670.272.000,- 9 bln	4.381.167.000,- 12 bln	
						II. BELANJA LANGSUNG						
Terlaksananya Kegiatan Rutin	Kegiatan rutin dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu	41,35	72,84	91,41	100,00	1.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	OUTCOME : Prosentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	546.305.000,- 44,76 %	316.580.000,- 72,83 %	221.567.000,- 91,53 %	1.097.088.200,- 100,00 %
						- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah tagihan/ rekening Telp/internet, Air dan Listrik	30.000.000,- 3 bln	12.000.000,- 6 bln	4.500.000,- 9 bln	50.000.000,- 12 bln	
						- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	22.805.000,- 3 bln	0,- 6 bln	0,- 9 bln	22.805.000,- 12 bln	
						- Penyediaan Alat Tulis Kantor	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kebutuhan Alat Tulis Kantor	- -	29.780.000,- 6 bln	220.000,- 9 bln	30.000.000,- 12 bln	
						- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.500.000,- 3 bln	15.500.000,- 6 bln	23.000.000,- 9 bln	24.500.000,- 12 bln	

**DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PASURUAN**

RENCANA KINERJA

TAHUNAN 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,- 3 bln	17.000.000,- 6 bln	20.000.000,- 9 bln	22.500.000,- 12 bln
						- Penyediaan Makanan dan Minuman	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	32.000.000,- 3 bln	53.000.000,- 6 bln	63.500.000,- 9 bln	71.500.000,- 12 bln
						- Penyediaan Jasa Perkantoran	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kebutuhan Jasa Perkantoran	407.000.000,- 3 bln	613.000.000,- 6 bln	785.750.000,- 9 bln	855.956.300,- 12 bln
						- Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kebutuhan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	75.000.000,- 3 bln	150.000.000,- 6 bln	180.000.000,- 9 bln	197.223.500,- 12 bln
						- Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	INPUT : DAU OUTPUT : 1. Jumlah kegiatan penilaian angka kredit 2. jumlah kegiatan forum opd	30.000.000,- 1 keg	0,- 0 keg	0,- 0 keg	30.000.000,- 1 keg
						2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Sarana terhadap Prasarana yang tersedia	38,46 %	70,60 %	89,67 %	100,00 %
						- Pembangunan Gedung Kantor	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah Gedung Kantor yang terbangun	- 3 bln	10.000.000,- 6 bln	0,- 9 bln	10.000.000,- 12 bln
						- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kebutuhan Perlengkapan Gdg Kantor	0,- 3 pkt	2.500.000,- 3 pkt	0,- 3 pkt	2.500.000,- 3 pkt
						- Pengadaan Meubelair	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kebutuhan Meubelair	0,- 1 pkt	2.500.000,- 1 pkt	0,- 1 pkt	2.500.000,- 1 pkt

RENCANA KINERJA
TAHUNAN 2020

TAHUNAN 2020													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
						- Pengadaan Peralatan Kantor	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kebutuhan Peralatan Kantor	30.000.000,- 4 pkt	0,- 4 pkt	0,- 4 pkt	30.000.000,- 4 pkt		
						- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah Gedung Kantor yang di perbaiki	85.000.000,- 1 pkt	0,- 1 pkt	0,- 1 pkt	85.000.000,- 1 pkt		
						- Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	84.000.000,- 3 bln	71.500.000,- 6 bln	24.250.000- 9 bln	195.000.000,- 12 bln		
						- Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah Peralatan Kantor yang di perbaiki	3.000.000,- 3 bln	5.000.000,- 6 bln	1.000.000- 9 bln	195.000.000,- 12 bln		
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.PROSENTASE ANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER 2.PROSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	5,37	10,74	16,11	21,48	3.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	OUTCOME : 1. Prosentase anggaran responsive gender 2. Prosentase Kekerasan perempuan yang terselesaikan 3.Prosentase kekerasan anak yang terselesaikan	482.783.650,- 1. 6,25 % 2. 25% 3. 25 %	513.633.250,- 1. 12,50 % 2. 50 % 3. 50 %	436.244.406,- 1. 18,75 % 2. 75 % 3. 75 %	1.490.340.806,- 1. 25,00 % 2. 100 % 3. 100 %	
		0,0015	0,0030	0,0045	0,0060			- Pelaksanaan KIE tentang Keadilan Kesetaraan Gender (KKG)	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kegiatan KIE KKG	215.970.000 14 keg	164.000.000,- 28 keg	194.300.000,- 32 keg	614.072.000,- 55 keg
								- Pelatihan Peningkatan Keterampilan bagi Organisasi Perempuan dan Masyarakat	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah organisasi perempuan dan masyarakat yang mendapat pelatihan	0,- -	25.583.000- 20 kelompok	0,- -	25.583.000- 20 kelompok
								- Evaluasi PUG	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kegiatan Evaluasi PUG	83.747.400,- 1 keg	88.147.000,- 1 keg	11.741.406,- 1 keg	183.635.806,- 4 keg

RENCANA KINERJA

TAHUNAN 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						- Fasilitas Perlindungan Perempuan	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah perempuan yang terfasilitasi	8.795.000,- 25 org	0,- 25 org	79.545.000,- 25 org	100.000.000,- 25 org
						- Fasilitas Perlindungan Anak	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah perempuan yang terfasilitasi	5.940.000,- 30 org	10.250.000,- 30 org	78.480.000,- 30 org	100.000.000,- 30 org
						- Fasilitas Kabupaten Layak Anak	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah OPD yang tersosialisasi tentang KLA	168.331.250,- 56 opd	225.653.250,- 56 opd	72.178.000,- 56 opd	467.050.000,- 56 opd
MENINGKATNYA KESERTAAN BER-KB	PROSENTASE SASARAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG MENJADI PESERTA KB AKTIF (PA)	18,30	36,60	54,90	73,20	4. KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	Peningkatan jumlah akseptor	2.232.457.944,- 1763 akseptor	4.671.997.944,- 3526 akseptor	7.159.504.650,- 5289 akseptor	8.074.171.380,- 7050 akseptor
						- KIE dan Pelayanan KB	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kegiatan pelayanan KIE dan pelayanan KB	188.310.000,- 13 keg	136.211.000,- 26 keg	50.465.000,- 39 keg	382.396.000,- 51 keg
						- Biaya Operasional KB	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah biaya BOKB	1.710.652.400,- 3 bln	2.539.638.800,- 6 bln	1.209.752.400,- 9 bln	7.094.696.000,- 12 bln
						- Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kegiatan pembinaan kader	200.000.000,- 3 bln	196.060.000,- 6 bln	0,- 9 bln	396.060.000,- 12 bln
						- Peningkatan dukungan sarana dan prasarana pelayanan dan penyuluhan KB	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah sarana prasarana penyuluhan dan pelayanan KB	970.500.000 2 jenis	- -	- -	970.500.000 2 jenis
						- Pencatatan Pelaporan dan Pendataan Keluarga	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kegiatan pencatatan pelaporan dan PK	0,- -	91.800.000,- 4 keg	- -	91.800.000,- 4 keg

RENCANA KINERJA
TAHUNAN 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						- Pembinaan Koalisi Kependudukan	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah keg. Pembinaan Koalisi Kependudukan	13.000.000,- 1 keg	- -	7.000.000,- 1 keg	20.000.000,- 1 keg
						- Sosialisasi Dimensi Kependudukan	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kegiatan Sosialisasi dimensi kependudukan	- 1 keg	18.150.000,- 1 keg	9.252.474,- 1 keg	27.402.474,- 1 keg
MENINGKATNYA KELUARGA SEJAHTERA YANG BERKUALITAS	PROSENTASE TAHAPAN KELUARGA PRA-S DAN KS-1	10,00	20,80	30,00	40,00	5. KETAHANAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN PENGGERAKAN	OUTCOME : 1. Penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dan KS 1 2. Peningkatan Jumlah Desa Yang memiliki kelompok Tribina	424.255.000,- 1. 275 KK 2. 3 Kelompok	391.798.000,- 1. 550 KK 2. 6 Kelompok	136.742.000,- 1. 825 KK 2. 9 Kelompok	964.420.000,- 1. 1100 KK 2. 10 Kelompok
						- Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kegiatan Pusyangatra	13.860.000,- 6 keg	5.075.000,- 12 keg	60.150.000,- 18 keg	79.085.000,- 22 keg
						- KIE Berbagai Media dan Mupen	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kegiatan KIE Berbagai Media Mupen	82.120.000,- 3 keg	62.750.000,- 6 keg	17.100.000,- 9 keg	161.970.000,- 12 keg
						- Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Konseling KRR	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kegiatan PIK/KRR	172.775.000,- 8 keg	39.175.000,- 16 keg	250.000,- 24 keg	213.325.000,- 30 keg
						- Pembinaan Tribina (BKB,BKR,BKL) dan UPPKS	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah keg Pelatihan / Pembinaan UPPKS	- -	105.040.000,- 12 keg	- -	105.040.000,- 12 keg

RENCANA KINERJA

TAHUNAN 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						- Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. daerah Kab / Kota dlm Pembangunan Keluarga melalui PKK	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kegiatan Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan	155.500.000,- 3 bln	179.758.000,- 6 bln	59.242.000,- 9 bln	405.000.000,- 12 bln
						6. PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	OUTCOME : Prosentase Pembinaan Lingkungan Sosial	475.000.000,- 100 %	- -	- -	475.000.000,- 100,00 %
						- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah Kegiatan Pembinaan & Pelatihan Keterampilan Kerja	475.000.000,- 6 kegiatan	- -	- -	475.000.000,- 6 kegiatan
						I. Belanja Tidak Langsung		2.091.710.000,- 47,74 %	1.120.030.000,- 81,23 %	670.272.000,- 92,88 %	4.381.167.000,- 100,00 %
						II. Belanja Langsung (1+2) :		5.212.806.050,- 27,29 %	4.115.371.050,- 65,46 %	2.096.273.280,- 90,54 %	13.344.703.480,- 100,00 %
						1. Sekretariat / Penunjang (Program 1 s/d 2)		748.305.000,- 52,25%	1.156.385.000,- 80,75%	1.403.202.000,- 97,98%	1.432.088.200,- 100,00 %
						2. Perjanjian Kinerja (a+b+c) :		4.464.501.050,- 37,48 %	7.647.556.944,- 64,20 %	10.771.109.650,- 90,42 %	11.912.615.280,- 100,00 %
						a. Bidang PP-PA (Program 3)		482.783.650,- 32,39%	996.416.900,- 66,86%	1.432.661.306,- 96,13%	1.490.340.806,- 100,00 %
						b. Bidang KB dan Dalduk (Program 4)		3.082.462.400,- 37,26 %	5.844.322.200,- 65,06 %	7.160.792.074,- 79,72%	8.982.854.474,- 100,00 %
						c. Bidang K3P (Program 5 dan 6)		899.255.000,- 13,92 %	1.291.053.000,- 89,69 %	1.427.795.000,- 99,19 %	1.439.420.000,- 100,00 %
						III. Total Anggaran (I+II)		7.304.516.050,- 41,21 %	12.539.917.100,- 70,74 %	15.306.462.380,- 86,35 %	17.725.870.480,- 100,00 %

Pasuruan, 31 Desember 2019

KEPALA DINAS KB DAN PP
KAB. PASURUAN


drg. Loembini Pedjati Lajoeng
Pembina Utama Muda
NIP. 19630626 199102 2 001